

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Grand Theory*

2.1.1. Teori kegunaan Informasi (*Decision-Usefulness Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori kegunaan informasi (*decision - usefulness theory*). Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan (*decision usefulness*) adalah Chambers. (Belkoui, 2001)

akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi; seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar pembuatan keputusan atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi keputusan. Sistem yang menyajikan informasi secara formal akan menyesuaikan dengan dua dalil umum. Pertama adalah kondisi dari setiap wacana ilmiah, system seharusnya secara logika konsisten; tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses lainnya. Kedua muncul dari pemakai laporan akuntansi sebagai dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik, informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan (dalam Belkoui, 2001).

Staubus (2003) dalam Sukmaningrum (2012) menyatakan teori kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku Amerika Serikat. Staubus (2003) dalam Sukmaningrum (2012) menyatakan pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain *a theory of accounting to investors*.

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang

ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. *SFAC* No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). *FASB* menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan.

Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan *bias*, dan mewakili apa yang digambarkan. Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan (*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-back value*), dan nilai prediktif (*predictivevalue*), dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (*representational faithfulness*), netralitas (*neutrality*), dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu, juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*).

2.1.2. Teori Stewardship

Teori Stewardship diperkenalkan sebagai teori yang mendasari tingkah laku dan premis (Donaldson dan Devis, 1997). Teori Stewardship didefinisikan sebagai suatu situasi dimana manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan principal.

Teori *Stewardship* atau pengabdian berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang manajemen sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Konsep teori ini didasarkan pada asas

kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab.

Dalam teori ini, *stakeholders* tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan lebih mendambakan pemenuhan kebutuhan tertinggi menurut hirarki kebutuhan Maslow, yaitu aktualisasi diri dan mendapatkan kepuasan dari pekerjaan yang ditekuni. Hal ini menghindarkan adanya konflik kepentingan antara *stakeholders* dengan manajemen yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi. Manajer juga akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Salah satu hal yang mendasari ini adalah bahwa prinsip bahwa manajer merasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dengan cara yang bijaksana dan hati-hati demi melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat luas. Sehingga, mereka tidak termotivasi untuk memenuhi keinginan pribadi mereka, tetapi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat luas inilah maka manajer tersebut merasa bahwa aktualisasi dirinya sudah terpenuhi dan dengan kepercayaan publik yang didapat, maka mereka tidak lagi menginginkan hal-hal materiil karena seجاتinya kebutuhan mereka telah terpenuhi.

2.1.3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Adapun fungsi akuntabilitas meliputi tiga unsur, yaitu (1) *providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity*, (2) *having the internal parties review the information*, and (3) *taking corrective actions where necessary*.

Suatu entitas yang *accountable* adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor, atau masyarakat secara luas) *me-review* informasi tersebut, serta bila

dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif (Sugijanto, et al (1995:6) dalam Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Dalam peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, Walikota wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Disamping undang-undang tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada intinya, semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.1.4. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan ini memiliki ciri dengan indikator : a) tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; b) adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu; c) adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; dan d) adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan (Dadang, 2006 dalam Sukmaningrum, 2012).

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik, dan pemerintah tentunya akan bekerja lebih serius dan disiplin, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah lebih partisipatif dan pro poor, mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal akan semakin kuat sehingga terhindar dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2.1.5. Nilai Informasi

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan UMKM antara lain :

- 1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
- 2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.6. Pengertian Informasi

Menurut Gellinas and Dull (2012:12) informasi merupakan data yang disajikan dalam suatu bentuk yang berguna terhadap aktifitas pengambilan keputusan.

Menurut Rommey dan Steinbart (2015:4), informasi adalah data yang telah dikelola dan di proses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan.

Menurut Gelinan dan Dull (2012:19), Ada beberapa karakteristik informasi yang berkualitas, yaitu:

- a. *Effectiveness*: berkaitan dengan informasi yang relevan dan berkaitan dengan proses bisnis yang di sampaikan dengan tepat waktu, benar, konsisten dan dapat digunakan.
- b. *Efficiency*: informasi yang berkaitan melalui penyediaan informasi secara optimal terhadap penggunaan sumber daya.
- c. *Confidentiality*: karakteristik informasi yang berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi serta validitas nya sesuai dengan nilai-nilai bisnis dan harapan.
- d. *Integrity*: karakteristik informasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap informasi yang sensitif dari pengungkapan yang tidak sah.
- e. *Availability*: suatu karakteristik informasi yang berkaitan dengan informasi yang tersedia pada saat diperlukan oleh proses bisnis baik sekarang, maupun di masa mendatang, hal ini juga menyangkut perlindungan sumber daya yang diperlukan dan kemampuan yang terkait.
- f. *Compliance*: yaitu karakteristik informasi yang berkaitan dengan mematuhi peraturan dan perjanjian kontrak dimana proses bisnis merupakan subjek nya berupa kriteria bisnis secara internal maupun eksternal.
- g. *Reliability*: karakteristik informasi yang berkaitan dengan penyediaan informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan entitas dan menjalankan tanggung jawab serta tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang diproses menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi yang menerimanya dalam aktivitas pembuatan keputusan.

2.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.1. Definisi

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada bab I pasal 1, definisi UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

2.2.2. Kriteria

UMKM memiliki beberapa kriteria untuk masing-masing usaha yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada bab IV pasal 6, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro.
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil.
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus jutarupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah.
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

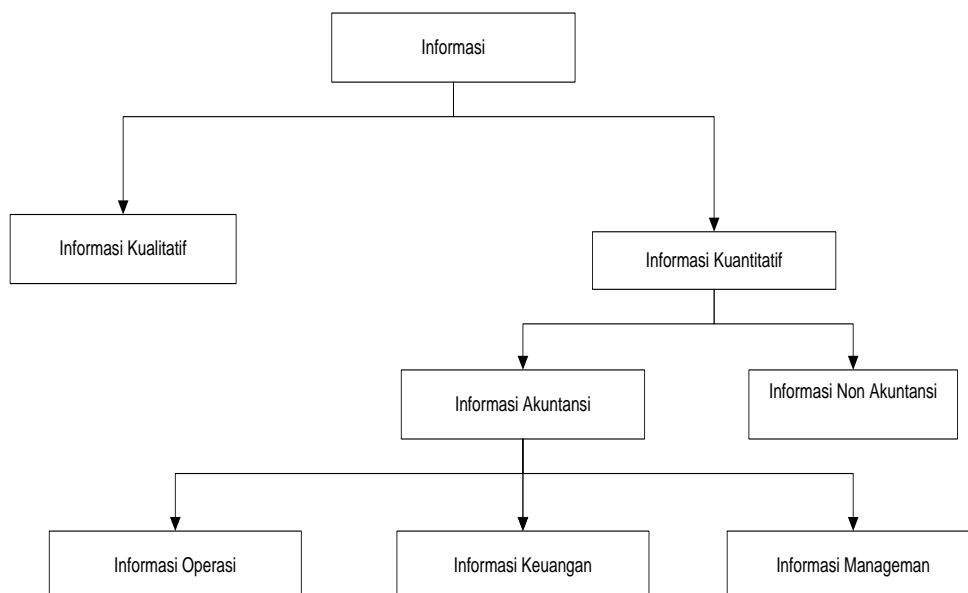
2.2.3. Penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM

Penggunaan informasi akuntansi pada UMKM membawa pengaruh positif terhadap keberhasilan UMKM. Hal tersebut diungkapkan oleh Arlianto (2014), penelitiannya pada UMKM Konveksi di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat penggunaan informasi akuntansi pada suatu usaha, maka tingkat keberhasilan UMKM juga akan

semakin meningkat. Penggunaan informasi akuntansi yang berupa informasi operasi, informasi akuntansi manajemen, dan informasi akuntansi keuangan dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk perencanaan usaha, mengontrol kegiatan usaha, mengambil keputusan dalam pengelolaan usaha, serta untuk melakukan evaluasi, sehingga hal tersebut nantinya dapat menunjang keberhasilan usaha.

Haswell dan Holmes (1989) dalam Solovida (2003) menjelaskan bahwa kekurangan informasi akuntansi dalam manajemen perusahaan dapat membahayakan perusahaan kecil. Kondisi keuangan yang memburuk dan kekurangan catatan akuntansi akan membatasi akses untuk memperoleh informasi yang diperlukan, sehingga berpotensi menyebabkan sulit berkembangnya perusahaan bahkan hingga terjadi kegagalan perusahaan.

Jenis informasi yang diperlukan dan harus disediakan oleh sebuah suatu usaha diringkas oleh Anthony dan Reece (1989) dalam Suwardjono (2013: 14) sebagai berikut:



Gambar 2.1 Jenis Informasi yang Harus Disediakan Suatu Usaha

Akuntansi tidak menghasilkan laporan tentang jumlah pegawai, adanya pemogokan, keadaan kesehatan direktur atau pemilik dan informasi lain yang

bersifat kualitatif. Walaupun demikian, laporan keuangan kuantitatif memberi petunjuk tentang hal-hal yang bersifat kualitatif.

Informasi akuntansi berguna bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang dinamis dan kompetitif karena informasi akuntansi membantu para manajer dalam mengintegrasikan inisiatif operasional dalam perencanaan strategi jangka panjang (Ismail and King, 2015).

Agar data keuangan dapat dimanfaatkan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan, maka data tersebut harus disusun dengan baik. Anthony dan Reece (1995) dalam Wibowo dan Kurniawati (2015) menggolongkan informasi akuntansi digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Informasi Operasi

Informasi ini menyediakan data mentah bagi informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Informasi ini dapat berfungsi sebagai alat pengawasan operasional perusahaan. Informasi operasi pada perusahaan manufaktur adalah informasi pembelian dan pemakaian bahan baku, informasi produksi, informasi penjualan, dan lain-lain.

2. Informasi Akuntansi Manajemen

Informasi akuntansi manajemen ditujukan kepada pihak internal perusahaan, dan merupakan informasi saat ini dan masa yang akan datang yang tidak memiliki sifat historikal. Informasi ini digunakan untuk tiga fungsi manajemen, yaitu perencanaan, implementasi dan pengendalian. Informasi akuntansi manajemen disajikan kepada manajemen perusahaan dalam bentuk laporan, seperti anggaran, laporan penjualan, laporan biaya produksi, laporan biaya menurut pusat pertanggung jawaban, laporan biaya menurut aktivitas, dan lain-lain.

3. Informasi Akuntansi Keuangan

Informasi akuntansi keuangan digunakan oleh manajer maupun pihak eksternal perusahaan, bertujuan untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan,

kinerja dan perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam hal pengambilan keputusan ekonomi. Wujud nyata dari informasi akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Informasi ini bersifat historikal dan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2.3. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas mikro, kecil dan menengah (EMKM). SAK ini disusun oleh Ikatan Akuntansi Keuangan tahun 2009 dan akan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2018.

2.3.1. SAK Entitas Mikro Kecil dan Menengah

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) ini merupakan salah satu dorongan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan UMKM yang lebih maju. Mengapa hal ini sangat dibutuhkan untuk usaha terutama UMKM? Karena laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam sebuah usaha. Pasti setiap pengeluaran dan pemasukkan harus jelas dan harus seimbang agar usaha bisa lebih maju lagi.

Sesuai dengan definisi dari SAK EMKM, pengertian serta kriteria EMKM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Berikut definisi UMKM yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008.

- **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah dan hasil penjualan tahunan dengan maksimal 300 juta rupiah.

- **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah dan hasil penjualan tahunan dengan maksimal 500 juta rupiah.
- **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih maksimal 300 juta rupiah dan hasil penjualan tahunan dengan maksimal 2 miliar rupiah.

2.3.1.1. Laporan Keuangan EMKM

Cara penyajian laporan keuangan EMKM telah disusun secara rinci pada ED SAK EMKM yang dimana penyajiannya harus konsisten, informasi keuangan yang komparatif, serta lengkap. Minimal laporan keuangan tersebut terdiri dari:

- Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- Laporan laba rugi selama periode

Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

2.3.1.2. Laporan Posisi Keuangan EMKM

Informasi posisi keuangan yang ditujukan untuk laporan keuangan telah disusun dalam ED SAK EMKM. Informasi ini terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu yang disajikan dalam laporan ini. Berikut penjelasan unsur-unsur laporan posisi keuangan dalam ED SAK EMKM:

- **Aset** merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Aset sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu aset yang memiliki wujud dan aset tidak memiliki wujud (tak berwujud).
- **Liabilitas** merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial dari liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki entitas saat ini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu yang dapat berupa kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif yaitu kewajiban yang biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.
- **Ekuitas** adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas

2.4. Penelitian Terdahulu

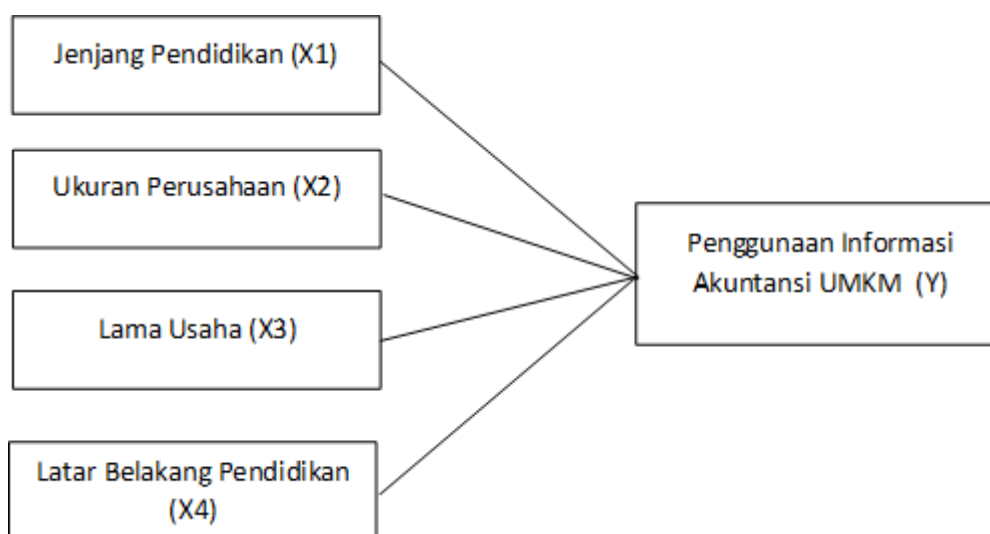
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Murniati (2002)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Pengusaha Kecil dan Menengah	Variabel (X) dalam penelitian ini yaitu, masa memimpin perusahaan, latar belakang pendidikan manajer/pemilik, pelatihan akuntansi, umur perusahaan dan skala usaha. Variabel (Y) yaitu, Penggunaan Informasi Akuntansi	Masa memimpin perusahaan, latar belakang pendidikan manajer/pemilik, pelatihan akuntansi, umur perusahaan dan skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi

2	Grece (2003)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM	Variabel (X) dalam penelitian ini yaitu, Masa Memimpin, Pendidikan Formal, Pelatihan Akuntansi, Umur Perusahaan, Skala Usaha	masa memimpin, pendidikan formal, pelatihan akuntansi, umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi skala usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi
3	Muhamad Wahyudi (2009)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi	Variabel (X) dalam penelitian ini yaitu, pendidikan manajer, skala usaha, lama usaha, umur perusahaan dan pengetahuan akuntansi	Pendidikan manajer/pemilik, skala usaha, berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi dan masa memimpin perusahaan, umur perusahaan dan pelatihan akuntansi manajer/pemilik tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi
4	Rudiantoro (2010)	Analisis Kualitas Laporan Keuangan,	Variabel (X) Latar Belakang Pendidikan,	Ukuran Usaha, Jenjang Pendidikan, dan Latar Belakang
5	Aufar (2014)	Faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UMKM	Variabel (X) Jenjang Pendidikan, Ukuran Perusahaan, Lama Usaha dan Latar Belakang Pendidikan. Variabel (Y) Penggunaan Informasi Akuntansi.	Jenjang Pendidikan, Ukuran Perusahaan, Lama Usaha dan Latar Belakang Pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi.

2.5. Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini berusaha menjelaskan penggunaan informasi akuntansi pada suatu UMKM yang terdiri dari informasi operasi, informasi akuntansi manajemen dan informasi akuntansi keuangan. Berdasarkan pemaparan diatas, gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.5.1. Bangunan Hipotesis

1. Pengaruh jenjang pendidikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan tersebut diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Jenjang pendidikan akan diukur berdasarkan pendidikan formal yang pernah diikuti sehingga pengukurannya bersifat kontinyu. Pendidikan formal yang dimaksud adalah

pendidikan yang diperoleh dibangku sekolah formal antara lain Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat, Diploma (DIII), Sarjana (SI) dan Pascasarjana (S2).

Murniati (2002) menemukan bahwa pengusaha dengan jenjang pendidikan formal yang rendah cenderung tidak memiliki persiapan dan penggunaan informasi akuntansi yang memadai dibandingkan pengusaha yang memiliki pendidikan formal lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan materi akuntansi yang lebih tinggi didapatkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemampuan dan keahlian pemilik atau manajer UKM ditentukan dari pendidikan formal yang pernah ditempuh. Tingkat pendidikan manajer atau pemilik menentukan pemahaman manajer/pemilik terhadap pentingnya penggunaan informasi akuntansi (Holmes dan Nicholls, 1988).

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa jenjang pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi di setiap pemilik UMKM yang nantinya akan berpengaruh terhadap persiapan dan kemampuan pemilik UMKM dalam penggunaan informasi akuntansi. Jenjang pendidikan formal yang rendah cenderung membuat pemilik UMKM kurang begitu memahami dalam penggunaan informasi akuntansi dibandingkan dengan pemilik UMKM yang memiliki jenjang pendidikan formal lebih tinggi. Dengan kata lain jenjang pendidikan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap kelangsungan UMKM tersebut. Hasil penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Aufar (2014) bahwa variabel jenjang pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi.

Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : Jenjang pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM

2. Pengaruh ukuran usaha terhadap penggunaan informasi pada UMKM.

Murniati (2002) menemukan bahwa ukuran usaha merupakan faktor yang sulit dipisahkan dengan lingkungan pengusaha UMKM. Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin

tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan makin besarnya ukuran usaha maka dapat mendorong seseorang untuk berpikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya.

Dilihat dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan sangat berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi di UMKM. Semakin besarnya ukuran UMKM serta lebih kompleksnya proses bisnis dari sebuah UMKM membuat kebutuhan akuntansi sangat diperlukan untuk kelangsungan sebuah UMKM. Informasi akuntansi tersebut yang nantinya bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajerial bagi UMKM. Hasil penelitian terdahulu yang di lakukan oleh AUFAR (2014) bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi.

Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H2 : ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM

3. Pengaruh lama usaha terhadap penggunaan informasi pada UMKM.

Lama usaha dalam hal ini adalah lamanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdiri atau umur dari UMKM semenjak usaha tersebut berdiri sampai pada saat penulis melakukan penelitian ini (Murniati,2002). Dengan asumsi bahwa semakin lama usaha tersebut berjalan maka akan mengakibatkan adanya perkembangan usaha yang signifikan kearah yang positif atau negatif. Dan biasanya usaha yang lebih lama berdiri cenderung lebih berkembang karena sudah memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan usahanya. Dan juga usaha yang memiliki umur yang bisa dibilang mapan lebih dapat beersaing dengan usaha/pelaku UMKM lainnya. Variabel ini diukur berdasarkan pada lamanya perusahaan berdiri (dalam tahun), sejak awal tahun pendirian perusahaan sampai dengan penelitian ini dilakukan.

Dilihat dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa lamanya usaha berdiri membuat kebutuhan akuntansi di UMKM sangat dibutuhkan dan membuat kesadaran pemilik UMKM terhadap pentingnya akuntansi sangat diperlukan

untuk menjaga kelangsungan usaha mereka dan untuk menumbuhkan UMKM tersebut. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aufar (2014) bahwa variabel lama usaha berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi.

Dari uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : lama usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.

4. Pengaruh latar belakang pendidikan terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Latar belakang pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus. Pengertian latar belakang pendidikan disini adalah latar belakang pendidikan formal.

Menurut Rudiantoro (2010), latar belakang pengusaha UMKM baik yang berasal dari bidang akuntansi maupun ekonomi atau bidang lainnya dapat mempengaruhi persepsinya terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi tumbuh dan berkembangnya usaha (Rudiantoro, 2010). Dengan adanya persepsi pentingnya akuntansi bagi UMKM diharapkan penggunaan akuntansi di UMKM dapat menjadi suatu hal yang wajib mereka jalankan.

Dilihat dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan seseorang dapat membuat praktek penggunaan akuntansi menjadi lebih besar, karena mereka lebih dapat mengetahui ilmu akuntansi tersebut daripada seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan diluar ekonomi. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aufar (2014) bahwa variabel latar belakang pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi.

Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H4 : latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.